

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, DAN JUMLAH
PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

RINGKASAN SKRIPSI



NUR ELISHA MAHARANI

1116 28981

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2020

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, DAN JUMLAH
PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana



NUR ELISHA MAHARANI

1116 28981

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2020

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NUR ELISHA MAHARANI

No Induk Mahasiswa: 111628981

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 1 September 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr., MSA., Ak., CA.

Penguji

Lita Kusumasari, SE., MSA., Ak.

Yogyakarta, 1 September 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Nur Elisha Maharani
Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
maharaninurelisha@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of inflation, the exchange rate and the number of Taxable Entrepreneurs on the receipt of Value Added Tax (VAT) either partially or simultaneously. The sample in this study covers the area of South Sumatra with monthly reports for the period 2016-2019. The sample used is forty-eight and data analysis for hypothesis testing is done by multiple linear regression.

The results showed that inflation, exchange rates, and the number of taxable entrepreneurs together had a significant effect on Value Added Tax revenues. Likewise, the effect partially on alpha 5% shows the same results that inflation and exchange rates, except for the number of taxable entrepreneurs, have a significant effect on value added tax revenues.

Keywords: Value Added Tax Revenue, Inflation, Exchange Rate, the number of Taxable Entrepreneurs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai baik secara parsial maupun simultan. Sampel dalam penelitian ini mencakup wilayah Sumatera Selatan dengan laporan bulanan selama periode tahun 2016-2019. Sampel yang digunakan berjumlah empat puluh delapan dan penganalisaan data untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, nilai tukar, dan jumlah Pengusaha Kena Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian pula dengan pengaruh secara parsial pada alpha 5% menunjukkan hasil yang sama bahwa inflasi dan nilai tukar, kecuali jumlah Pengusaha Kena Pajak masing-masing berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kata kunci: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Inflasi, Nilai Tukar, Jumlah PKP

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia selaku salah satu daerah berkembang tengah berusaha semaksimal mungkin melakukan pembangunan nasional. Bidang pajak merupakan salah satu pendanaan yang terbanyak diterima negara guna memodali pembangunan. Perpajakan ialah hal paling krusial pada penyelenggaraan kepentingan bersama demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan pemerataan diseluruh bidang dan pembangunan di Indonesia (Sinambela & Rachmawati, 2016).

Sumber penghasilan negara sektor pajak melingkupi pajak dalam negeri yang berupa PPN, PPh, PPnBM, dan PBB. Sumber penghasilan negara sektor pajak juga melingkupi pajak perdagangan internasional. Jika diperhatikan dalam APBN, penerimaan pajak ialah penerimaan terbesar bagi negara dan penerimaan PPN berada diurutan kedua setelah PPh.

Pajak Pertambahan Nilai ialah pajak yang dikenakan pada konsumsi di area pabean. Aktivitas konsumsi umumnya merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh negara berkembang seperti Indonesia, apabila banyak masyarakat melakukan pengkonsumsian akan membuat total yang diterima semakin meningkat.

Daerah di Sumatera Selatan cukup kaya dengan potensi perpajakan. Dilihat dari taraf kualitas penduduk, Sumatera Selatan selalu mengalami perbaikan. Hal ini nampak dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selalu mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2019. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi penerimaan negara dari sisi perpajakan.

Penerimaan pajak diputuskan oleh pengaruh dari dalam (*internal*) ataupun luar (*external*). Dari *internal*, berkaitan dengan peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak, sedangkan dari *external* dapat terlihat dari kondisi sebuah negara, contohnya inflasi dan nilai tukar.

Faktor *internal* guna menjamin kelanjutan penerimaan PPN dipengaruhi ketentuan perpajakan yang sudah ditetapkan. Dibutuhkan komunikasi baik dari berbagai pelaku yang memiliki keterkaitan. Ditekankan untuk membayarkan pajak dengan tertib serta patuh bagi wajib pajak dan dari Direktorat Jendral Pajak selaku pembuat ketentuan perpajakan. Subjek Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia ialah wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. PKP yaitu individu ataupun

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

badan hukum yang berada di Indonesia melaksanakan penyerahan BKP dan JKP. Banyaknya PKP yang mematuhi guna melaksanakan kewajiban akan membuat penerimaan makin naik.

Penyebab dari *external* dipengaruhi oleh kondisi makro negara. Instabilitas ekonomi makro bisa berakibat tidak baik pada aktivitas finansial. Jika instabilitas berlangsung menerus, tingkat konsumsi dan aktivitas perdagangan internasional dapat menurun sehingga berdampak pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Elemen yang berlaku ialah inflasi dan nilai tukar. Kestabilan rupiah atas barang juga jasa akan nampak dari inflasi, sedangkan kestabilan mata uang bisa dilihat dari nilai tukarnya.

Inflasi tinggi berefek pada terjadinya peningkatan dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terutang. Tinggi rendahnya bisa berpengaruh pada kondisi ekonomi, Pajak Pertambahan Nilai (Sinambela & Rachmawati, 2016). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam rentang waktu 2016-2019, tingkat Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan selalu mengalami penurunan tiap tahunnya. Persentase di tahun 2016 adalah 3,58, 2017 menjadi 2,96, 2018 menjadi 2,74 dan menjadi 2,06 di tahun 2019.

Laju tingkat inflasi harus selalu diperhatikan sebab akan berdampak pada seluruh sektor usaha. Buntut inflasi yang tinggi akan berimbas pula pada nilai tukar rupiah terhadap USD.

Saat nilai tukar mengalami penurunan, harga barang domestik akan mengalami peningkatan, sehingga berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Beberapa efek negatif apabila hal ini berlangsung terus menerus adalah perusahaan dalam negeri dengan kegiatan usaha yang melakukan aktivitas perdagangan internasional akan berdampak pada nilai jual yang ditawarkan pada pembeli semakin tinggi dan menyebabkan pembelian menurun sehingga menyebabkan penurunan penerimaan pajak.

Banyak hal membuat penerimaan perpajakan tidak sesuai ekspektasi. Variabel inflasi, nilai tukar serta jumlah pengusaha yang dikenakan pajak memiliki implikasi yang cukup terkait. Tiga variabel ini berupa data yang tidak tetap, baik langsung maupun tidak langsung ketidaketapan ketiga faktor tersebut akan berefek pada penerimaan pajak, dianggap penting sebab diketahui jika pajak sangat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berperan sebagai sumber penerimaan, sehingga peneliti ingin tahu bagaimana hal tersebut berpengaruh pada Pajak Pertambahan Nilai.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Teori

Teori Peacock dan Wiseman

Berdasarkan teori Peacock dan Wiseman, perkembangan ekonomi mengakibatkan pungutan pajak makin meningkat meski tarif pajak tetap. Oleh karena itu, saat keadaan normal, peningkatan GNP mengakibatkan penerimaan pemerintah yang makin tinggi (Wiseman & Peacock, 1961).

Perpajakan Secara Umum

Ketentuan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak diartikan sebagai iktu serta individu ataupun badan kepada negara yang memiliki sifat memaksa, tak memperoleh imbalan langsung serta dipakai bagi kepentingan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak yang dikenai pada pemakaian BKP maupun JKP pada area dalam negeri (pabean) (Warnita, Fauziati, & Muslim, 2016). PPN ialah ragam pajak tak langsung bersifat objektif yang disetorkan produsen dan membebankan pajak terutang kepada konsumen selaku pemakai produk akhir.

Inflasi

Tingkat inflasi merupakan peningkatan nilai produk secara umum dan menerus pada jangka waktu tertentu (Bank Indonesia, 2018). Seperti diketahui bahwa pengenaan PPN yaitu nilai perolehan BKP serta JKP dengan tarif yang sepadan, yakni sepuluh persen sehingga inflasi terpengaruh pada Pajak Pertambahan Nilai.

Nilai Tukar

Nilai tukar merupakan konversi nilai uang asing ke uang dalam negeri, ditetapkan oleh Bank Indonesia (Wijayanti, 2015). Oleh karena itu dibutuhkan nilai tukar dari setiap mata uang untuk tukar menukar produk atau pelayanan yang dilakukan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

antarnegara guna memenuhi kebutuhan pada perdagangan internasional. Nilai tukar biasa disebut kurs. Mata uang yang dipakai dalam penelitian ini ialah USD serta dalam negeri memakai Rupiah.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP ialah pengusaha yang menyerahkan produk yang kena pajak menurut ketentuan yang berlaku (Renata, Hidayat, & Kaniskha Bayu, 2016). Wajib Pajak yang mempunyai kriteria sesuai peraturan harus ditetapkan menjadi PKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menkeu. Kewajibannya diantaranya ialah pemugutan, penyetoran serta pelaporan PPN yang telah dipungut ataupun disetor. Bertambahnya PKP terdaftar akan menambah potensi penerimaan perpajakan juga peningkatan realisasinya.

B. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Tingkat inflasi akan mempengaruhi nilai BKP dan JKP, seperti diketahui bahwasanya dasar pengenaan PPN yakni nilai perolehan BKP dan JKP dengan tarif sepuluh persen. Hal tersebut menjadikan inflasi mempengaruhi penerimaan PPN.

H₁: Terdapat pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Nilai tukar menunjukkan nilai valuta dalam negeri dalam valuta asing. Rupiah yang melemah mengakibatkan ekspor yang tinggi sehingga membuat konversi ke rupiah semakin tinggi maka akan menambah penerimaan PPN, sedangkan rupiah yang menguat akan membuat ekspor menurun (Ginting, 2013). Rupiah yang menguat akan membuat nilai permintaan barang impor meningkat, sedangkan rupiah yang melemah akan menurunkan nilai permintaan barang impor karena saat nilai tukar mengalami pelemahan akan membuat harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat akan mengalami kenaikan sehingga berimbas pada tingkat konsumsi yang akhirnya mempengaruhi penerimaan PPN.

H₂: Terdapat pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam rangka menggapai target peningkatan penerimaan pajak tiap tahun, DJP berupaya memperluas sumber pengenaan pajak, seperti meningkatkan jumlah PKP. Meningkatnya jumlah PKP serta patuh akan kewajibannya akan mampu meningkatkan penerimaan perpajakan.

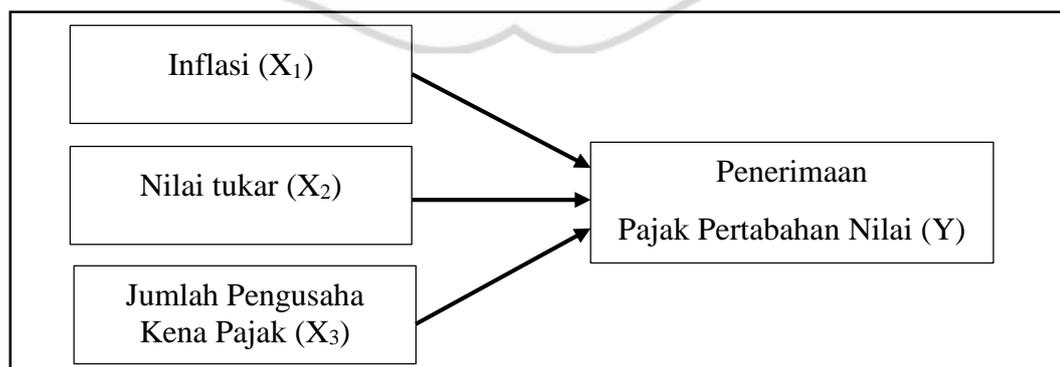
H₃: Terdapat pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengaruh inflasi, nilai tukar dan jumlah Pengusaha Kena Pajak secara bersama terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Guna meningkatkan penerimaan pajak terutama PPN dapat diputuskan oleh faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam bisa meliputi kebijakan di bidang perpajakan seperti penambahan jumlah wajib pajak yang dalam hal Pajak Pertambahan Nilai ialah penambahan jumlah Pengusaha Kena Pajak. Faktor dari luar meliputi kondisi ekonomi makro negara seperti inflasi dan nilai tukar, apabila inflasi dan nilai tukar berada dikondisi yang teratasi akan meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga dapat memberi efek yang bagus bagi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H₄: Terdapat pengaruh inflasi, nilai tukar dan jumlah Pengusaha Kena Pajak secara bersama terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kerangka Konseptual



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mengenai pengaruh inflasi, nilai tukar dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN yang dilakukan pada website BPS Povinsi Sumatera Selatan (sumsel.bps.go.id), Bank Indonesia (bi.go.id) serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. Seluruh proses penelitian diperkirakan akan memakan waktu selama tujuh bulan sejak february 2020 sampai dengan agustus 2020.

B. Sampel dan Data Penelitian

Pada penelitian ini yang dipakai yaitu data sekunder yang datanya peneliti peroleh dari instansi terkait. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif sebab peneliti ingin melakukan pengujian efek dari variabel *independent* dan *dependent*.

Populasi dalam penelitian ini adalah data inflasi, nilai tukar rupiah, jumlah PKP dan jumlah penerimaan PPN di Sumatera Selatan dalam kurun waktu Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 yang berjumlah 48 pengamatan yang nantinya keseluruhan data dijadikan sebagai sampel penelitian. Metode penentuan sample yaitu sampel jenuh yang memakai seluruh anggota populasi sebagai sampel. Data penelitian ini berupa *time series* yang dihimpun tiap kurun waktunya. Deretan tersebut dipakai guna menunjukkan keadaan perkembangan suatu data dari waktu ke waktu.

Pengumpulan data-data dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan. Data yang dibutuhkan pada penelitian terkait diambil dari website BPS Provinsi Sumatera Selatan, Bank Indonesia serta KPP Madya Palembang.

C. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel terikat (*dependent*)

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu penerimaan PPN. Pajak PPN ialah pajak yang diperuntukkan pada pengkonsumsian BKP dan JKP pada daerah dalam negeri (pabean) (Warnita, Fauziati, & Muslim, 2016).

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi data analisis meliputi jumlah Penerimaan PPN yang KPP Madya Palembang terima dari Pengusaha Kena

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pajak setiap bulan yang dihitung sejak Januari 2016 hingga Desember 2019. Variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berskala nominal.

2. Variabel bebas (*independent*)

Inflasi

Inflasi merupakan perubahan harga secara umum pada satu tahun yang dihitung menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) (Sukirno, 2004). Penetapan inflasi menjadi variabel bebas pada penelitian ini lantaran tingkat inflasi tingkat inflasi selaku tingkat perubahan harga secara umum dapat pula memperlihatkan keadaan ekonomi suatu negara.

Inflasi yang dijadikan data analisis meliputi angka tingkat inflasi wilayah Provinsi Sumatera Selatan setiap bulan yang dihitung sejak Januari 2016 hingga Desember 2019. Variabel inflasi berskala rasio.

Nilai Tukar

Nilai tukar merupakan konversi valuta asing ke rupiah, ditetapkan oleh Bank Indonesia (Wijayanti, 2015). Variabel nilai tukar dipakai pula sebab penerimaan pajak yang dikenakan pada penelitian ini melibatkan pajak atas aktivitas perdagangan internasional sehingga dipandang sangat krusial guna melihat nilai riilnya.

Nilai tukar yang dijadikan data analisis meliputi pergerakan nilai tukar rupiah setiap bulan yang dihitung sejak Januari 2016 hingga Desember 2019. Variabel nilai tukar berskala nominal.

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak merupakan pelaku usaha yang melaksanakan penyerahan BKP serta JKP menurut ketentuan yang berlaku (Renata, Hidayat, & Kaniskha Bayu, 2016). Penetapan jumlah pengusaha pajak menjadi variabel bebas di dalam penelitian lantaran dipercayakan menjadi pihak ketiga dalam pemungutan PPN, sehingga jika pengusaha makin banyak dikukuhkan menjadi PKP maka penyerahan JKP dan BKP akan semakin banyak pula dan dapat menjadi peluang meningkatnya penerimaan PPN.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PKP yang dijadikan data analisis meliputi jumlah PKP terdaftar di KPP Madya Palembang setiap bulan, terhitung sejak Januari 2016 hingga Desember 2019. Variabel Pengusaha Kena Pajak berskala nominal.

D. Metode dan Teknik Analisis

1. Metode analisis

Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu analisa regresi linear berganda guna menguji sejauh mana pengaruh variabel. Dilaksanakan pada program aplikasi berbantuan komputer berupa SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version.

Model regresi berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$PPN = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- PPN : Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Bo : Konstanta
 β_1 : Koefisien regresi inflasi
 β_2 : Koefisien regresi nilai tukar
 β_3 : Koefisien regresi jumlah Pengusaha Kena Pajak
 X_1 : Inflasi
 X_2 : Nilai Tukar
 X_3 : Pengusaha Kena Pajak
e : Tingkat error

2. Teknik Analisis

Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalitas

Dipakai dengan tujuan guna pengujian apakah dalam model, variabel bebas dan terikat berdistribusi normal ataupun tidak, model yang baik memiliki atau mendekati distribusi normal. Pengujian normalitas yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan melihat histogram dan penyebaran titik pada sumbu diagonal dari grafik *Normal Probability Plot* (Ghozali, 2009).

Dasar pengambilan keputusan grafik histogram yaitu ketika grafik menunjukkan pola distribusi normal berarti model regresi berdistribusi normal, sedangkan grafik *Normal Probability Plot* sebagai berikut:

- a. Ketika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal berarti model berdistribusi normal.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Ketika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal berarti model tidak berdistribusi normal.

2. Uji multikolonieritas

Dipakai guna melihat bentuknya apakah didapati hubungan diantara variabel *independent*. Jenis yang bagus harusnya tidak terjadi hubungan antar variabel *independent*. Cara mendeteksinya yaitu memperhatikan penilaian Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance (TOL). Apabila nilai $VIF \leq 10$ dan $TOL \geq 0,1$ berarti bisa dibilang bebas dari multikolonieritas dan berarti tidak terdapat hubungan antar variabel *independent*.

3. Uji heterokedastisitas

Dipakai untuk melakukan deteksi apakah tidak terjadi keserupaan varians dari residual satu pengamatan ke yang lain. Melihat sebaran titik *scatterplot*, apabila sebaran diciptakan penyebaran atas bawah pada sumbu Y angka 0, berarti bebas akan heterokedastisitas.

4. Uji autokorelasi

Digunakan guna pengujian pada model regresi adanya relasi diantara kesalahan pengganggu atas periode tahun ini dan setahun yang lalu. Bisa dipakai dengan uji Durbin-Watson yang selanjutnya dibandingkan dengan table Durbin-Watson yang terdiri atas dua nilai yaitu batas atas (dU) dan batas bawah (dL). Model yang bagus ialah model yang bebas akan autokorelasi. Model yang bebas akan autokorelasi yaitu apabila nilai Durbin-Watson terdapat diantara dU dan (4-dU).

Uji Hipotesis

1. Uji Model (Uji - F)

Dipakai dengan tujuan guna melihat pengaruh keseluruhan variabel *independent* secara bersama-sama memiliki pengaruh atas variabel *dependent*. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terjadi pengaruh secara simultan. Pada uji F ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05.

2. Uji Parsial (Uji - t)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dipakai guna melihat pengaruh tiap-tiap variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti terjadi pengaruh secara parsial. Pada uji t ini juga digunakan tingkat signifikansi 0,05.

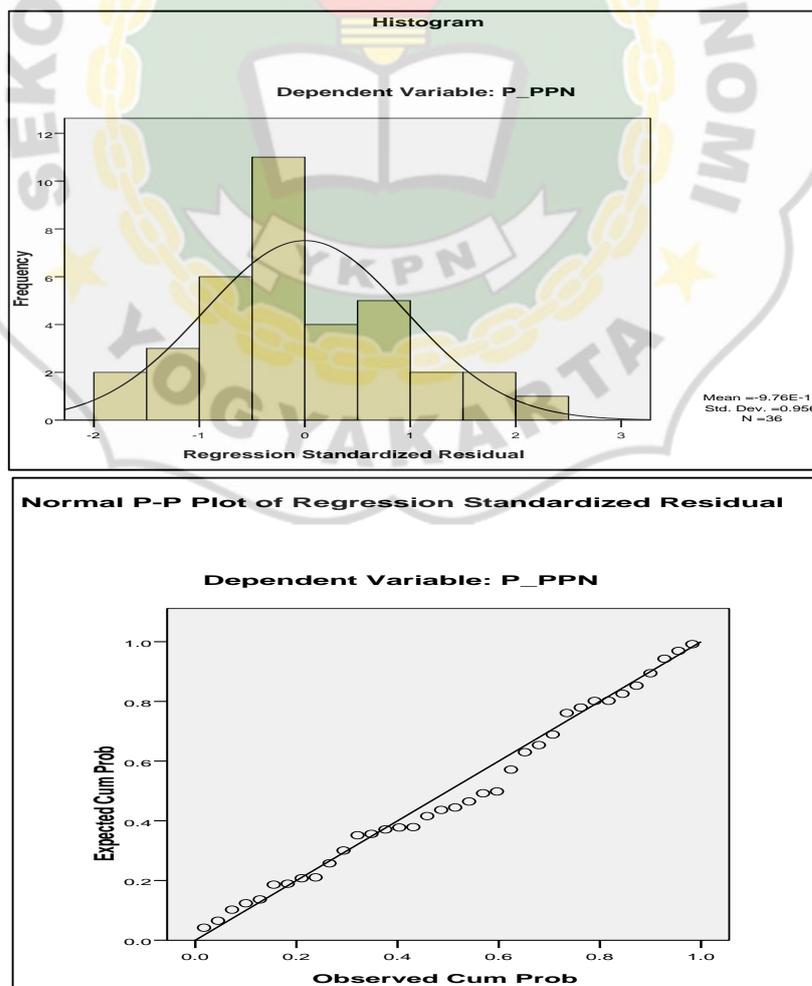
3. Koefisien Determinasi (R-Square)

Dipakai dengan tujuan untuk mengukur telah sampai mana variabel *independent* dalam mendeskripsikan *dependent*. Penilaian yang terdekat dengan angka satu menunjukkan variabel *independent* nyaris memberi segala penjelasan diperlukan guna mengestimasi variabel *dependent* (Ghozali dalam Salawati: 2008).

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Gambar 1 Uji Normalitas
Sumber: Data sekunder yang diolah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dari gambar 1 diketahui berdasar tampilan grafik histogram dan grafik *Normal Probability Plot* diketahui grafik histogram menampilkan pola distribusi yang normal, begitu pula dengan grafik *Normal Probability Plot* yang menunjukkan bahwa titik-titik data berada di sekitar garis diagonal dan juga bergerak mengikuti arah garis, sehingga bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

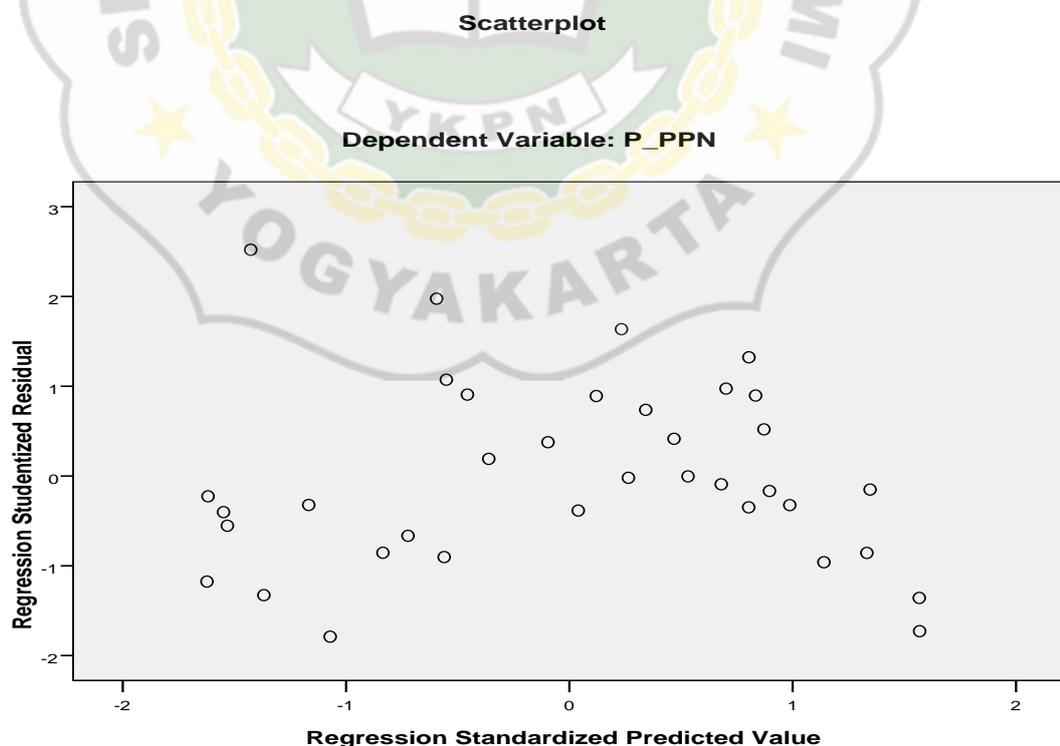
b. Uji Multikolinieritas

Tabel 1 Uji Multikolinieritas
Sumber: Data sekunder yang diolah

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Inflasi	0,379	2,642	Bebas multikolonieritas
Nilai Tukar	0,353	2,831	Bebas multikolonieritas
Jumlah PKP	0,557	1,795	Bebas multikolonieritas

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa tidak terdapat variabel *independent* yang bernilai $TOL \geq 0,1$. Begitu juga nilai VIF tiap variabel tidak terdapat yang bernilai $VIF \leq 10$. Bisa diambil kesimpulan jika model regresi pada pengkajian ini bebas dari multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data sekunder yang diolah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar 2 menunjukkan adanya titik dengan penyebaran acak tidak berbentuk pola diatas ataupun dibawah angka 0 sumbu Y, oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan jika model regresi tidak pada heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 2 Uji Autokorelasi
Sumber: Data sekunder yang diolah

Durbin-Watson
1,264

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,722, kemudian pada tabel Durbin-Watson didapat nilai batas atas (dU) sebesar 1,2437 serta batas bawah (dL) sebesar 1,6505. Nilai $dU < d < 4-dU$ sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Uji Hipotesis

a. Uji Model (Uji – F)

Tabel 3 Uji Model
Sumber: Data sekunder yang diolah

	F	Sig.	Keterangan
Regression	24,555	0,000 ^b	Berpengaruh

Hasil uji model pada tabel 3, didapatkan F_{hitung} sebesar 24,555 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan F_{tabel} bernilai sebesar 2,9. Berdasarkan nilai signifikansi, $Sig. 0,000 < 0,05$ dan berdasarkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , $F_{hitung} 24,555 > F_{tabel} 2,9$, dapat disimpulkan bahwa variabel *independent* secara simultan berpengaruh terhadap variabel *dependent*.

b. Uji Determinasi (R-Square)

Tabel 4 Uji Determinasi
Sumber: Data sekunder yang diolah

R	R Square	Adjusted R Square
0,835 ^a	0,697	0,669

Pada tabel 4 nilai koefisien determinasi sebesar 0,835 yang menunjukkan bahwa keterkaitan antara variabel *independent* dengan *dependent* ialah erat. Uji determinasi menunjukkan seberapa banyak variabel *independent* bisa menjelaskan variabel *dependent*. Nilai koefisien *Adjusted R Square* sebesar 0,669 menunjukkan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bahwa variabel *dependent* bisa dijelaskan oleh variabel *independent*, sedangkan 0,331 dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

c. Uji Parsial (Uji – t)

Tabel 5 Uji Parsial
Sumber: Data sekunder yang diolah

	t	Sig.	Keterangan
Inflasi	-3,221	0,003	Berpengaruh
Nilai Tukar	2,417	0,022	Berpengaruh
Jumlah PKP	1,124	0,269	Tidak berpengaruh

Berdasar tabel 5 hasil pengujian hipotesis secara parsial antara variabel *independent* dan *dependent* dianalisis sebagai berikut:

- Variabel inflasi menunjukkan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$ dan $t_{tabel} 3,221 > t_{hitung} 2,048$ yang berarti bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh signifikan atas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Variabel nilai tukar menunjukkan tingkat signifikansi $0,022 < 0,05$ dan $t_{tabel} 2,417 > t_{hitung} 2,048$ yang berarti bahwa variabel nilai tukar memiliki pengaruh signifikan atas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak menunjukkan tingkat signifikansi $0,269 > 0,05$ dan $t_{tabel} 1,124 < t_{hitung} 2,048$ yang berarti bahwa variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan atas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

d. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Uji Regresi Linear Berganda
Sumber: Data sekunder yang diolah

	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	-10,380	-10,374
Inflasi	-1,150	0,357
Nilai Tukar	5,601	2,317
Jumlah PKP	0,369	0,329

Berdasarkan tabel 6 didapatkan nilai konstanta sebesar -10,380, nilai inflasi sebesar -1,150, nilai tukar sebesar 5,601, serta nilai jumlah Pengusaha Kena Pajak sebesar 0,369 sehingga bisa dikembangkan dengan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

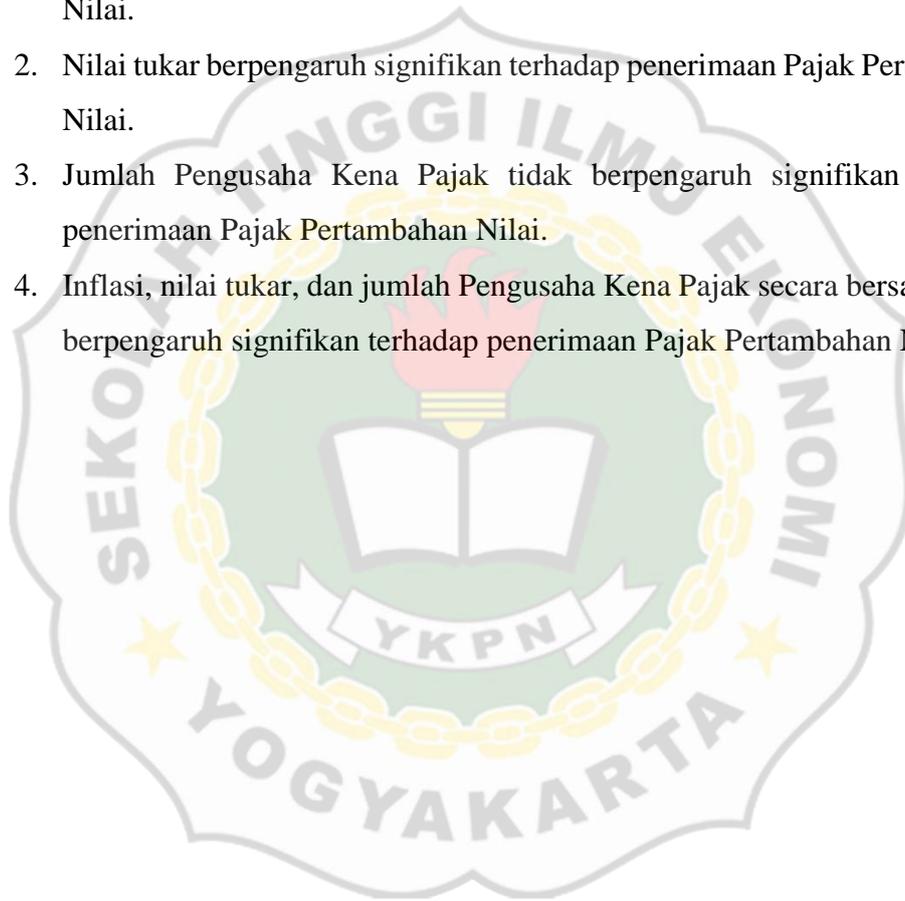
$$PPN = -10,380 - 1,150X_1 + 5,601X_2 + 0,369X_3 + e$$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KESIMPULAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan guna melihat pengaruh inflasi, nilai tukar dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang terdaftar di KPP Madya Palembang tahun 2016-2019. Hasil pengujian yang dilakukan terhadap 48 sampel adalah sebagai berikut:

1. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Inflasi, nilai tukar, dan jumlah Pengusaha Kena Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2018, July 31). *Pengenalan Inflasi*. Retrieved from Bank Indonesia:
<https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, A. M. (2013). Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Ekspor Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL.7 NO.1, JULI 2013*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha Bayu. (2016). Pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1* .
- Sinambela, T., & Rachmawati, S. (2016). *Perpajakan, Buku 1*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Warnita, T., Fauziati, P., & Muslim, R. Y. (2016). *Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.
- Wijayanti, A. (2015). *Analisis Penerimaan Pajak Indonesia : Pendekatan Ekonomi Makro*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Wiseman, J., & Peacock, S. T. (1961). *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom*. New Jersey: Princeton University Press.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
<https://www.sumsel.bps.go.id>
<https://www.bi.go.id>
<https://www.kemenkeu.go.id>
KPP Madya Palembang